

---

## Pembelajaran Toleransi dan Kearifan Lokal pada Masyarakat Plural: Belajar dari Penyelesaian Konflik Sosial di Poso

Asep Mahpudz

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v10i.663](https://doi.org/10.30595/pssh.v10i.663)

Submitted:

30 April, 2023

Accepted:

20 Mei, 2023

Published:

24 Juli, 2023

#### Keywords:

Conflict Resolution;  
Tolerance Learning; Local  
Wisdom; Multiculturalism;  
Poso

### ABSTRACT

This paper aims to analyze the application of local wisdom values and tolerance as good lessons for conflict resolution in post-conflict Poso society. In the Poso conflict, religion was not the main cause of the conflict. The existence of rivalry between elements of society in fighting over political and bureaucratic economic resources became the root of the problem of conflict in Poso. The reason religion becomes a support for political legitimacy and identity to commit violence against others. The potential for conflict in the Poso community can be reduced through the application of local wisdom values and tolerance values. Learning about the values of local wisdom and tolerance is an important factor in reconciliation to strengthen the solidarity of the people who were divided during the conflict. The cultural values of Sintuwu Maroso as the local wisdom of the people in Poso and the application of tolerance values in society are important to continue to develop so that they can reduce conflict and can become an adhesive for peaceful life in Poso.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



#### Corresponding Author:

**Asep Mahpudz**

Universitas Pendidikan Indonesia  
Jalan Dr. Setyabudhi 229 Bandung  
Email: [asepmahpudz@upi.edu](mailto:asepmahpudz@upi.edu)

---

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki beragam suku, agama, etnis, dan bahasa. Indonesia dapat disebut sebagai Negara multicultural. [1]. Kondisi Negara Indonesia dengan beragam budaya yang dimiliki dan wilayah yang luas berpotensi untuk munculnya konflik horizontal dan perpecahan di masyarakat. [2]. Kondisi Indonesia seperti ini, memerlukan pengelolaan yang pas agar dapat mencegah konflik, bahkan justru memunculkan integrasi social yang kuat sebagai suatu Negara dan bangsa yang plural. Keragaman masyarakat Indonesia dengan beragam budaya, etnis, agama dan bahasa ini merupakan anugrah dan fitah dari Tuhan. Adanya semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan pengikat dan keunikan yang dimiliki bagi bangsa Indonesia.

Banyak peristiwa yang dapat menjadi contoh di Indonesia, terkait dengan keragaman budaya dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Contoh nyata dan pernah terjadi adalah peristiwa konflik di Poso pada awal reformasi di Indonesia, yakni sekitar tahun 1998 sampai 2002. Dari peristiwa konflik Poso di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat menjadi pembelajaran dan bermakna bagi kita sebagai sebuah bangsa bahwa untuk persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang plural memerlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat. Redanya konflik Poso tidak lepas dari kesadaran masyarakat poso sendiri dan berkembangnya nilai-nilai toleransi.

Konflik yang terjadi di Poso terbilang berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan berulang. Kerusuhan masyarakat di Poso masih terjadi, terutama adanya saling serang antar kelompok masyarakat. Konflik masyarakat di Poso sering disebut sebagai konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).

Konflik yang terjadi di Poso sebagai konflik antar suku dan antar pemeluk agama yang berbeda. [3]. Konflik dengan sebutan konflik dengan identitas agama dan suku, seperti di Poso ini ada pula yang menyebut sebagai upaya untuk menutupi adanya persaingan dan perebutan kekuasaan politik local di Poso.[4]

Sampai akhir tahun 2019, konflik Poso dapat dikemukakan telah berhenti dan sudah tidak ada lagi saling serang antar kelompok masyarakat secara terbuka. Dari konflik di Poso ini, dapat menjadi pembelajaran dalam konteks langkah dan cara penyelesaian konflik yang terjadi antar masyarakat. Toleransi menjadi kunci menjadi modal sosial yang cukup efektif untuk menghentikan konflik yang terjadi. Kondisi seperti ini akan memerlukan perhatian dan kepedulian bersama. Hal ini karena dapat terjadi memunculkan kembali konflik, jika masalah yang tersisa dari konflik Poso ini diabaikan, misalnya terkait dengan kepemilikan tanah dan lahan.[5]. Tulisan ini mendeskripsikan beberapa langkah yang telah dilakukan dalam kurun waktu tahun 2004 – 2019 untuk resolusi konflik dengan menguatkan aspek pendidikan dan pembelajaran toleransi dan penguatan kearifan lokal budaya Poso.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode *literature review*, melalui langkah diawali dengan mencari teori dan konsep yang relevan untuk mengkaji kasus. Konsep dan teori yang dipilih digunakan sebagai alat analisis untuk mengembangkan kajian dan analisis secara konseptual. [6]. Beberapa konsep dan pandangan yang ditemukan tentang akar masalah konflik di Poso menjadi bahan untuk dikaji dan dianalisis. Selanjutnya, direkonstruksi dengan konsep dan teori yang digunakan. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan menarasikan dan mendeskripsikan sehingga dapat dipahami oleh khalayak dengan baik. [7].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Memahami Peristiwa Konflik Poso

Peristiwa konflik yang terjadi di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikaji dengan perspektif sosial karena kesalahpahaman antar pemuda yang memicu perkelahian diantara mereka. Perkelahian antar pemuda ini terjadi dalam keadaan mabuk minuman keras. Kebetulan perkelahian diantara dua pemuda yang berbeda agama. Dari kesalahpahaman ini berkembang menjadi luas dalam lingkup kabupaten karena informasi menyebar dengan cepat, terlebih yang disebarkan terkait dengan isu agama. Bahkan semakin menimbulkan sentimen etnis dan agama karena menimbulkan korban jiwa dari kedua kelompok. Banyak kalangan akhirnya mengkategorikan peristiwa konflik antar masyarakat di Poso ini sebagai konflik bernuansa agama dan etnis.[8]. Pada perkembangan selanjutnya, kerusuhan di Poso semakin meluas dan menyentuh aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Akibatnya upaya penyelesaian konflik di Poso ini semakin sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama.[3].

Konflik yang terjadi di Poso ini, berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama dan berulang. Dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Waktu konflik di Poso**

No	Waktu	Peristiwa yang terjadi
1.	Desember 1998	Perkelahian dan penusukan pemuda, sebagai pemicu kerusuhan di malam natal dan saat bulan Ramadan.
2.	April – Mei 2000	Terjadi saling serang antar kelompok masyarakat yang semakin meluas di wilayah Kabupaten Poso
3.	Juli 2001	Konflik terjadi dengan massif dan menimbulkan korban jiwa
4.	November 2001	Konflik terjadi semakin meluas dengan massif, menimbulkan korban jiwa dan sudah tersegmentasi berdasarkan etnis dan agama

Sumber: diolah dari berbagai referensi

Setelah terjadi empat tahapan itu, pemerintah mendorong untuk kedua pihak yang berkonflik untuk melakukan perdamaian di Malino. [9]. Dari prespektif kehidupan politik, peristiwa konflik Poso ini terkait dengan kontestasi politik lokal yang ditambah dengan identitas agama dari kandidat yang dimunculkan. Kabupaten Poso memang mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga bagi masyarakat menginginkan Bupati beragama Kristen, yang saat terjadi peristiwa kerusuhan Bupatinya beragama Islam.[10]. Jika dikaji dari perspektif sosial dan ekonomi, konflik yang terjadi ini karena aspek keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah saat itu semakin menurun, kehidupan ekonomi pun kurang baik, kecemberuan sosial antara masyarakat lokal dan pendatang semakin meruncing ditambah adanya provokasi dengan sentiment agama dan etnis. [11]. [12].

Kondisi Kabupaten Poso merupakan wilayah pertanian yang terus berkembang seiring pesatnya pembangunan yang dilakukan. Sudah sejak lama wilayah Kabupaten Poso secara geografis dan demografis menjadi wilayah tujuan transmigrasi. Selain itu, wilayah Poso menjadi lintasan jalan penghubung trans Sulawesi, yang menghubungkan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Akibatnya

Poso menjadi tujuan bagi masyarakat yang berasal dari Sulawesi selatan maupun Sulawesi utara. Pendatang yang bermukim dan berusaha di Poso semakin banyak dan beragam. Dapat dikatakan Poso sebagai miniatur Indonesia, karena penduduknya multi etnis, multiagama, multibudaya dan multi bahasa daerah.[13]. Kehidupan masyarakat Poso semakin berkembang dan jika dikaji, justru masyarakat pendatang yang berhasil dalam kehidupan ekonomi. Wilayah yang semula sebagai wilayah transmigrasi semakin berkembang dan kehidupan masyarakatnya memiliki kemampuan ekonomi yang lebih mapan dibandingkan dengan penduduk lokal. Hal ini dapat diduga menjadi pemicu kecemburuan sosial ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam aspek perdagangan di Poso semakin berkembang, karena pada umumnya yang berdagang para pendatang. Setidaknya hal ini secara perlahan menggeser kehidupan ekonomi pertanian yang sudah sejak lama dikembangkan di Poso. Kegiatan ekonomi dalam aspek perdagangan di Poso pada umumnya dikelola oleh penduduk yang beragama Islam, sedangkan ekonomi pertanian pada umumnya oleh penduduk yang beragama Kristen. Hal ini menumbuhkan sentimen agama.[13] [14].

Dari perspektif kehidupan keagamaan, masyarakat lokal Poso merupakan penganut agama Kristen dan bermukim di wilayah bagian tengah dan pegunungan. Sedangkan, wilayah pesisir dan perkotaan seiring dengan dinamika pembangunan infrastruktur banyak didiami oleh pendatang yang beragama Islam. Adanya program pemerintah dengan pembukaan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa, coklat dan cengkeh, menyebabkan semakin banyak warga yang mendatangi wilayah Poso. Kesejahteraan masyarakat yang awalnya pendatang, baik dari selatan maupun dari utara (Gorontalo) semakin meningkat sehingga kepemilikan lahan banyak beralih kepada mereka dengan membeli dari penduduk lokal. [12]. Akibatnya aspek ketimbangan ekonomi terjadi di antara penduduk Poso.[15]. Aspek lainnya yang dapat dianalisis dari peristiwa konflik di Poso adalah dari perspektif pemerintahan. Wilayah Poso yang strategis, menjadi jalur perlintasan antara wilayah Sulawesi bagian selatan, tengah dan utara, menjadi wilayah yang memudahkan akses bagi warga untuk mengembangkan usaha dan bermukim di Poso. Dinamika politik lokal dan pemerintahan di Poso lumayan dinamis. Proporsi penduduk yang semula pendatang dan beragama Islam semakin banyak, sehingga pada rekrutmen pegawai negeri sipil pun terimbas dan semakin nampak.[16]

#### **b. Penguatan Toleransi Masyarakat Poso dengan Kearifan Budaya Lokal *Sintuwu Maroso***

Indonesia sebagai Negara dan bangsa yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan bahasa merupakan realitas yang tidak dapat dibantah [17]. Adanya semboyan Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa menjadi pengikat bagi integrasi nasional Indonesia. [2]. Masyarakat Indonesia yang bercirikan dengan dimilikinya ragam budaya, etnis, agama dan bahasa, perlu dijaga agar tidak terjadi konflik antar masyarakat. Strategi untuk menjaga kondisi masyarakat Indonesia yang aman dan nyaman perlu dilakukan secara sistematis, terencana, terprogram dan berkesinambungan. [18]. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan melalui pengembangan pendidikan berbasis keragaman yang dimiliki masyarakat. Masyarakat wilayah Kabupaten Poso yang multi budaya, agama, etnis, dan bahasa merupakan fakta dan memiliki kearifan budaya lokal yang disebut dengan *sintuwu maroso*. Pendekatan pendidikan menjadi alternatif solusi dalam berkontribusi resolusi konflik di Poso dalam jangka panjang. Hal ini telah terbukti selama kurun waktu Tahun 2004 sampai 2007, dan 2007 sampai tahun 2012, ihtiar dengan mengembangkan pendidikan berbasis multi budaya ini dikembangkan di wilayah Poso. Secara konseptual, pendidikan berbasis multi budaya yang dikembangkan ini berbeda dengan pendidikan multikultural pada umumnya.[19]. Perbedaan yang dapat dikemukakan dimulai dari inisiatif awal yang berdasarkan kemauan berubah dari masyarakat dari beragam kelompok yang berbeda secara budaya, agama dan etnis. Selain itu, pada pelaksanaan pendidikan, terlihat keterlibatan warga, dan orangtua dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, maka toleransi menjadi faktor utama untuk mendukung langkah dan arah membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.[20]

Dari apa yang dikembangkan pendidikan berbasis multi budaya di wilayah Poso, dapat dikemukakan bahwa pemahaman terhadap realitas perbedaan yang dimiliki ini dapat menumbuhkan sikap keterlibatan pemikiran dan perilaku yang inklusif. Hal ini pada gilirannya sangat berkontribusi pada kehidupan yang harmonis di masyarakat Poso. Ini menjadi bukti bahwa sikap dan tindakan yang toleran dari masyarakat Poso menjadi resolusi konflik yang nyata. Dapat dikemukakan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia, pada sebagian besar disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap perbedaan yang dimiliki serta minimnya nilai nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan. [21]. Nilai-nilai toleransi, demokratis, humanis, pluralis, dan religius selayaknya dapat dikembangkan pada pendidikan di masyarakat Indonesia yang multi budaya. [22]. Nilai-nilai ini menjadi penting sebagai substansi pembelajaran terutama di wilayah yang rawan konflik, seperti di Kabupaten Poso. Sangat penting disadari, bahwa upaya resolusi konflik perlu terus dilakukan dan memerlukan upaya rekonsialisasi secara terus menerus.[23]. Upaya membangun rasa tenang dan nyaman dalam kehidupan masyarakat menjadi bagian penting, agar konflik dapat dicegah secara berkelanjutan.

Adanya upaya penyelesaian konflik yang dilakukan di Poso, dengan memisahkan komunitas masing masing yang beragama Kristen dan Islam di wilayah yang berbeda menjadi ihtiar yang baik dalam jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat keamanan untuk mencegah kekerasan. Namun hal ini akan

berdampak pada integrasi sosial di masa depan dalam jangka panjang.[24]. Jika dianalisis, konflik yang bernuansa etnis, agama yang terjadi di wilayah Poso timbul karena akar masalahnya belum terdeteksi secara baik diawal, sehingga memunculkan konflik yang lumayan lama dan berulang, karena akar masalah pada budaya dan agama [25]. Dalam konteks ini, maka potensi konflik dari adanya keragaman budaya, etnis, agama dan bahasa yang ada di wilayah Poso akan memerlukan pengelolaan dengan baik secara sistematis, sistemik dan berkelanjutan. Secara positif, apabila potensi konflik ini dikelola dengan baik akan memunculkan integrasi sosial yang harmoni dengan mengakomodasi kepentingan yang berbeda dalam kebersamaan.[26].

Secara konseptual, memang manusia akan hidup sesuai dengan nilai nilai budaya dan agama yang dianutnya. Agama menjadi spirit religiusitas dan nilai budaya menjadi spirit humanitas dalam kehidupan sosial. Salah satu bagian dari budaya yang dimiliki disebut dengan kearifan budaya local (*local wisdom*). Local wisdom ini dapat dimaknai sebagai ajaran hidup dan pandangan, maupun pepatah dan nilai nilai tradisi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang dihormati dan diamalkan dalam kehidupan sehari hari.[27]. *Sintuwu Maroso* merupakan kearifan budaya lokal pada masyarakat Poso yang menjadi basis modal sosial dalam kehidupan sehari hari yang dapat dikembangkan untuk menjadi resolusi konflik. [5].

*Sintuwu Maroso* merupakan bentuk dari kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Pamona di kabupaten Poso yang memiliki nilai nilai baik dan luhur. Nilai nilai seperti persaudaraan, toleransi, kebersamaan, peduli, solidaritas dan persatuan terkandung pada budaya sintuwu maroso. Selesaiannya konflik di Poso salah satu faktor dan utama dalam penyelesaian konflik karena diterapkannya nilai nilai budaya sintuwu maroso. Nilai nilai yang ada di sintuwu maroso menjadi pegangan dan aspek perekat masyarakat dari perbedaan agama, budaya, etnis dan bahasa untuk bersatu kembali. Makna yang terkandung dalam *sintuwu maroso*, antara lain perihal kehidupan yang harmonis dalam keberagaman yang dimiliki. Hal ini termuat dari nilai nilai *mosintuwu* yang berasal dari kata *sintuwu* yang bermakna bercampur gaul dengan baik, dapat hidup bersama dengan dasar pada kesamaan dalam kehidupan. Nilai nilai toleransi yang termuat dari makna sintuwu maroso karena dilandasi oleh kebersamaan dan kerjasama untuk mencapai tujuan kehidupan yang saling membutuhkan. Makna dari kata *Maroso* adalah kuat, teguh pendirian dan kokoh. Hal ini bermakna lebih dalam bahwa kehidupan akan harmoni jika diringi oleh kesesuaian dan setuju untuk mencapai tujuan kehidupan yang kuat secara ekonomi, kokoh, aman dan sejahtera. Kata kunci dari hal ini adalah adanya toleransi terhadap adanya perbedaan yang dimiliki dengan orientasi yang sama dalam kehidupan. Secara konseptual, dapat dikemukakan bahwa kearifan budaya lokal dapat menjadi langkah dan mekanisme sosio kultural yang terdapat dalam tradisi masyarakat Indonesia menjadi modal sosial dalam resolusi konflik.[27]. Tradisi ini dapat menjadi sarana yang baik untuk membangun solidaritas sosial sehingga dapat lebih menguatkan nilai nilai sosial dan tatanan sosial dan budaya masyarakat, terutama yang beragam. [31]. Langkah resolusi konflik yang mengedepankan nilai nilai kearifan budaya lokal yang dimiliki masyarakat menjadi langkah strategis dan penting serta efektif yang disesuaikan dengan konteks masyarakatnya.

Nilai yang terkandung dalam kearifan budaya lokal sintuwu maroso terbukti telah menjadi factor penting dalam penyelesaian konflik di Poso, termasuk dapat dikembangkan melalui pendidikan di wilayah Poso secara berkesinambungan yang berbasis pada budaya. Pendidikan yang mengedepankan perbedaan yang dimiliki, baik dalam budaya, agama, etnis, dan bahasa dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural. Pendidikan ini merupakan langkah mentransformasi pengetahuan, nilai, dan sikap serta keterampilan dalam masyarakat yang memiliki perbedaan budaya, agama, etnis dan bahasa secara individu, kelompok maupun bangsa dengan menekankan kepercayaan bahwa perbedaan adalah anugrah Tuhan dan keniscayaan dalam kehidupan.[28].

### **c. Pendidikan Harmoni sebagai Pendidikan Karakter Kontekstual di Poso yang dikembangkan**

Indonesia sebagai bangsa, keberlanjutan dan keberlangsungannya di masa depan akan sangat tergantung kepada kemampuan warga bangsa untuk mempertahankan jati diri dalam mempertahankan kearifan budaya lokal secara konsisten agar terjaga nilai-nilai dalam kehidupan sebagai ciri dari pluralitas yang dimiliki.

Kearifan budaya lokal di Indonesia sangat banyak dan beragam. Telah banyak contoh yang baik dari kearifan budaya lokal ini di Indonesia di masing masing wilayah yang menjadi inspirasi bagi daerah lainnya untuk dikembangkan sebagai modal sosial. Dalam konteks penyelesaian konflik dan pasca konflik di Poso yang dikembangkan adalah melalui pendidikan yang berbasis pada nilai nilai kearifan budaya lokal yang ada di Poso. Pendidikan yang berbasis multikultural terbukti telah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi konflik, termasuk pula yang terjadi di Poso.[29].

Pengembangan pendidikan untuk membangun kedamaian di Poso pasca konflik dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak. Komponen masyarakat termasuk pemerintah daerah terlihat dalam upaya membangun kembali nilai-nilai kearifan budaya lokal sintuwu maroso sebagai basis nilai nilai yang dikembangkan. Dari beberapa langkah dan pendekatan yang dikembangkan, sebagai inisiasi dari komponen masyarakat, maka istilah Pendidikan harmoni dikenalkan sebagai label nama untuk pendidikan multikultural yang dikembangkan di Kabupaten Poso. Terdapat beberapa sekolah dasar yang menjadi pilihan sebagai *piloting* program pendidikan kedamaian yang dikembangkan. Program ini melibatkan beberapa komponen masyarakat,

tokoh agama, tokoh budaya, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tentu pemerintah daerah. Salah satu sekolah yang dapat disebut berhasil mengembangkan program ini adalah SDN 7 Poso. Pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan harmoni dengan mendasarkan pada 3 asas yang dikembangkan yakni; harmoni diri (disiplin diri), harmoni sesama (menjaga kebersamaan dan persatuan), dan harmoni alam (menjaga lingkungan).[30]. Pendidikan harmoni dapat dikategorikan sebagai inisiasi bersama komponen masyarakat di kabupaten Poso untuk menindaklanjuti pasca konflik agar tidak terjadi konflik. Inisiasi ini mendasarkan pada netralitas agama, etnis dan budaya serta bahasa yang dimiliki. Inisiasi ini dapat disebut sebagai langkah pendidikan karakter kontekstual di Poso sebagai wilayah dengan penduduk yang beragam dalam aspek budaya, etnis, agama dan bahasa. Nilai nilai dan sikap toleransi dikembangkan secara intensif kepada siswa dan ditekankan bagi guru guru di sekolah. Belajar yang dikembangkan adalah belajar saling menghormati, saling pengertian, toleran, peduli, kasih sayang, tanggungjawab sosial, solidaritas.[30]

Pendidikan Harmoni yang dikembangkan di Poso sebagai pendidikan karakter kontekstual, dimulai dari langkah mengembangkan rasa damai dalam batin dan pikiran individu. Setiap individu mengeksplorasi pengetahuan, pemahaman masing masing tentang kebenaran dalam beragama budaya yang dianutnya. Langkah selanjutnya, setiap siswa diajak untuk mengenalkan nilai kebenaran yang dimiliki dan disampaikan kepada teman yang berbeda di kelas sehingga menumbuhkan apresiasi terhadap teman yang berbeda (budaya, agama, etnis, bahasa). Dari hal ini maka akan menumbuhkan saling menghargai dan memahami adanya perbedaan dan persamaan yang dimiliki. Setelah itu, dikembangkan langkah belajar hidup bersama dalam suasana kedamaian dan harmoni dengan mengutamakan kualitas relas antara individu dalam komunitas yang berbeda. Siswa selanjutnya diajak untuk saling mengerti dan menyadari adanya persamaan dan perbedaan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kehidupan sosial dan budaya. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam konteks ini adalah pengembangan cinta terhadap diri (kesadaran diri), cinta terhadap sesama (solidaritas), cinta terhadap alam, menumbuhkan kesadaran dan keterampilan komunikasi interpersonal agar tumbuh toleransi, saling memberi dan menerima dalam pergaulan sosial sehingga dapat mengambil keputusan dengan nalar yang baik. [19].

Dalam konteks pengembangan pendidikan IPS di Indonesia, aspek penguatan pendidikan nilai, pewarisan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia menjadi penting di era seperti sekarang. Berdasarkan pengalaman praktis selama ini, dalam pemberdayaan masyarakat melalui *Participatory Action Research* dalam penanggulangan konflik di Poso, menunjukkan bahwa pranata sosial yang selama ini ada, ternyata masih dapat dibangun kembali, direvitalisasi untuk mengelola potensi konflik dan integrasi sosial.

#### **d. Kearifan Budaya Lokal sebagai Sumber Materi dalam Pengembangan IPS di era Glibal**

Kearifan budaya lokal yang ada, dimiliki di setiap kelompok masyarakat, serta berkembang dengan baik dapat menjadi bahan materi dan sumber pembelajaran bagi pendidikan nilai, karakter kepada siswa, terutama pada pembelajaran IPS. Nilai-nilai yang terkandung pada kearifan budaya lokal di masyarakat dapat menjadi sumber materi untuk dikemas dalam pembelajaran IPS sejauh tidak bertentangan dengan nilai nilai luhur bangsa. [32]. Dalam konteks ini, selaras dengan pemahaman konsep bahwa pada hakekatnya proses pendidikan sebagai transformasi nilai-nilai baik untuk kebaikan kehidupan selanjutnya. Esensiya adalah pendidikan IPS tidak dapat terlepas dari kebudayaan yang berkembang di masyarakatnya. Pelestarian kearifan budaya lokal sudah pasti akan banyak menemui kendala dan lumayan membutuhkan upaya kerja keras dari segenap komponen, terlebih di era global. [33]. Namun demikian ihtiar seperti itu, perlu terus dikembangkan agar identitas budaya dan jati diri sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai khas kebangsaan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.[34].

Pada era globalisasi saat ini, selayaknya pendidik dengan didukung oleh pemerintah berkewajiban melindungi, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai produk budaya agar tetap lestari dan tidak dikalahkan oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa [35]. Pendidikan IPS dapat menjadi alternatif sebagai wahana untuk mengangkat nilai-nilai kearifan budaya lokal menjadi kajian tema dan mengakomodasi kebutuhan tetap terjaganya nilai-nilai budaya secara baik dan berkelanjutan. Ada baiknya jika mulai sekarang pada pembelajaran pendidikan IPS menerapkan pendekatan belajar *inkuiri* dan *diskoveri*, agar dapat mengakselerasi pencapaian tujuan belajar Pendidikan IPS [36].

Materi pembelajaran IPS yang bersumber dari kearifan budaya lokal memuat tentang pengertian, makna, konsep, dan prinsip-prinsip kearifan budaya lokal [37]. Hal tersebut perlu mendapat perhatian segenap insan pendidik dan peneliti pendidikan IPS agar tujuan pembelajaran lebih bermakna. Kebermaknaan tujuan pembelajaran IPS akan lebih baik dan efektif, jika bahan kajian dan tema pembahasan dirasakan akrab, dekat, dan menyentuh diri peserta didik. Urgensi pembelajaran IPS yang mengungkapkan nilai kearifan budaya lokal diorientasikan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kehidupan sosial, meningkatkan keterampilan sosial agar mampu berperan aktif di masyarakat. Program pembelajaran IPS dalam konteks ini dapat dipandang sebagai proses pendidikan yang membina dan menyiapkan siswa dalam kehidupan sosial di kehidupan sehari-hari, dan sangat dinamis. [38].

Beberapa ciri yang dapat dikemukakan pada pendidikan IPS yang mengungkap tema kearifan budaya lokal sebagai berikut: (a). Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan situasi dan kondisi aktual siswa bertempat tinggal, atau sangat dekat dan dirasakan dengan kehidupan sosialnya; (b). Pelaksanaan pembelajaran dengan tema kearifan budaya lokal mengungkapkan nilai-nilai positif yang bermakna bagi kehidupan sosial siswa dan masyarakat; (c). Kegiatan belajar dilakukan melalui proses pembelajaran aktif dan mandiri sehingga bermakna bagi pengembangan jati diri siswa dan masyarakat. Terlihat adanya pewarisan nilai positif dari budaya masyarakat; (d). Berkembangnya keterampilan berfikir kritis dan analitis siswa yang didasarkan pada pemahaman yang baik terhadap permasalahan di lingkungan kehidupannya; (e) Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, toleransi dan komunikasi sosial.

Pembelajaran IPS di masa kini dan masa depan, seharusnya dikembangkan dengan metode dan cara kreatif, seperti bermain peran, menerapkan permainan, pembelajaran yang menyenangkan dan menantang berkembangnya potensi diri siswa. Mengungkap dan menerapkan tema kearifan budaya lokal pada pembelajaran IPS di sekolah dan Perguruan Tinggi menjadi sangat penting dan strategis dalam pengembangan karakter siswa ataupun mahasiswa. Kearifan budaya lokal dapat dipandang sebagai modal utama masyarakat dalam membangun jati diri tanpa mengubah atau merusak tatanan sosial yang telah ada. Justru hal ini sebagai usaha adaptif dengan lingkungan kehidupan. Pentingnya mengungkap nilai-nilai kearifan budaya lokal menjadi bahan materi kajian pada pendidikan IPS sangat relevan dan terkait erat proses belajar siswa dengan kondisi realitas sosial dalam hidup dan kehidupan sosialnya.

Terintegrasinya kearifan budaya lokal pada pendidikan IPS akan semakin menguatkan pembinaan karakter siswa. Mengungkapkan dan memasyarakatkan nilai-nilai kearifan budaya lokal pada proses pembelajaran IPS menjadi penting dilakukan oleh pendidik. Pendidikan IPS perlu lebih menguatkan kemampuan keterampilan sosial siswa. Keterampilan bertanya, memahami, keterampilan bersikap terhadap masalah akan mudah dikembangkan apabila proses pembelajaran bermakna dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program pendidikan IPS tidak cukup hanya memuat materi dalam bentuk pengetahuan, tetapi perlu dikembangkan materi berupa nilai-nilai dan spiritualitas yang berkembang di masyarakat [39]. Langkah dan strategi yang dikembangkan ini bertujuan untuk menguatkan jatidiri sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai baik, terutama menguatkan nilai, sikap dan tindakan toleran, inklusif, saling menghormati sesama dengan menghargai perbedaan yang dimiliki terlebih di era masa depan yang sudah tidak jelas lagi batas batas Negara.

#### 4. SIMPULAN

Konflik sosial yang terjadi di Poso pada awal reformasi, dapat menjadi pembelajaran berharga dalam aspek penguatan nilai-nilai kearifan budaya lokal dan pembelajaran aspek nilai dan sikap toleransi bagi generasi muda. *Sintuwu maroso* sebagai bentuk kearifan budaya lokal yang dimiliki masyarakat Poso dapat menjadi modal sosial untuk pencegahan konflik selanjutnya. Hal ini karena Poso sebagai wilayah yang memiliki beragam budaya, agama, etnis dan bahasa.

Pendidikan Harmoni yang dikembangkan di Kabupaten Poso selama ini, telah membuktikan bahwa melalui pendidikan yang terencana, sistematis, berkelanjutan dapat dikembangkan menjadi resolusi konflik yang tepat dalam jangka panjang, sekaligus sebagai pendidikan karakter kontekstual.

Nilai nilai yang terkandung dalam kearifan budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat, terutama nilai nilai yang baik dapat dikemas sebagai sumber dan bahan materi pembelajaran IPS. Terlebih jika dihadapkan pada kepentingan menjaga jatidiri kebangsaan di era globalisasi dan revolusi Industri 4.0 serta society 5.0.

#### DAFTAR REFERENSI

- [1] Z. H. Manna and I. K. Syafiie, "Strategi Pemerintah Daerah Poso Periode 2010-2015 dalam Menghadapi Konflik Sosial," *J. Ilmu Pemerintah. Kebijakan. Publik*, vol. 1, no. 2, pp. 225–256, 2014.
- [2] G. Lestari, "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara," *J. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 28, no. 1, pp. 31–37, 2015.
- [3] Nanny, "Konflik Poso Dan Upaya Penanggulangannya," pp. 10–15, 2014, [Online]. Available: <http://jim.stimednp.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Konflik-Poso-Dan-Upaya-Penanggulangannya.pdf>.
- [4] W. R. Jati, "Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan," *Walisongo*, vol. 21, no. November, pp. 393–416, 2013.
- [5] I. K. Yakobus, M. Yahya, and A. D. M. P. Agustang, "Revitalisasi Nilai Budaya Sintuwu Maroso Sebagai Alternative Resolusi Pasca Konflik Di Kabupaten Poso," *J. Sosio Sains*, vol. 5, no. 1, pp. 14–21, 2019, [Online]. Available: <http://journal.ildikti9.id/sosiosains>.

- [6] J. W. Creswell, *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 4th ed. SAGE Publications, Inc, 2014.
- [7] G. R. Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara, Sos. Hum.*, vol. 9, no. 2, pp. 57–65, 2005, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/4388-ID-memahami-metode-kualitatif.pdf>.
- [8] G. Van Klinken, "Citizenship and local practices of rule in Indonesia," *Citizensh. Stud.*, vol. 1025, pp. 1–17, 2018, doi: 10.1080/13621025.2018.1445489.
- [9] Adam and Malkan, "Dinamika Konflik di Kabupaten Poso," *ISTIQRA, J. Penelit. Ilm.*, vol. 4, no. 1, pp. 145–174, 2017.
- [10] I. Alganih, "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)," *Criksetra J. Pendidik. Sej.*, vol. 5, no. 10, pp. 166–174, 2016.
- [11] S. Cinu, "Agama , Militerisasi dan Konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tengah)," *Al-Fikra J. Ilm. Keislam.*, vol. 15, no. Januari-Juni, pp. 1–49, 2016, doi: 10.24014/af.v15i1.4007.
- [12] KONTRAS, "Laporan penelitian Bisnis Militer di Poso Sulawesi Tengah," 2004.
- [13] Siradjuddin, "Akar-Akar Konflik Fundamental Perspektif Ekonomi Politik," *J. Iqtisaduna*, vol. 1, no. 2 Desember, pp. 18–39, 2015, [Online]. Available: <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/1192>.
- [14] I. Suriady, "Tesis: Manajemen Konflik Masyarakat Poso Pasca Deklarasi Malino," 2004.
- [15] M. Abdulkadir-sunito, S. Adiwibowo, E. Soetarto, R. A. Kinseng, and S. Foley, "Batas Politik Etnisitas? Migrasi dan Transformasi Dataran Tinggi di Sulawesi Tengah," *Sodality*, vol. 5, no. 3, pp. 226–233, 2017, [Online]. Available: <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/19396/13497>.
- [16] M. Rendi, "Konflik SARA Di Kabupaten Poso Tahun 1998-2001," *Ilmu Sos.*, vol. 6, no. 4, 2014.
- [17] M. A. S. Hikam, "Pendidikan Multikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia," *Glob. J. Polit. Int.*, vol. 17, no. 1, pp. 1–17, 2015, [Online]. Available: <https://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=3557>.
- [18] A. Yusuf, *Konflik Dan Dominasi Budaya Dalam Masyarakat Plural*, vol. 12, no. J. Multikultural Multireligius. 2013.
- [19] A. Mahpudz, Jamaludin, and A. Palimbong, "Tolerance Learning to Develop Students Social Skills in the 21st Century," 2020, vol. 458, no. Icssgt 2019, pp. 169–178, doi: 10.2991/assehr.k.200803.022.
- [20] N. Najmina, "Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia," *Jupiiis J. Pendidik. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 10, no. 1, p. 52, 2018, doi: 10.24114/jupiiis.v10i1.8389.
- [21] P. Hadisaputra and B. R. Amaliasyah, "Tolerance Education in Indonesia: a literature review," *Dialog*, vol. 43, no. 1, pp. 75–88, 2020.
- [22] K. Kester, "Education for Peace: Content, Form, and Structure: Mobilizing Youth for Civic Engagement," *Peace Confl. Rev.*, vol. 4, no. 2, pp. 1–10, 2010.
- [23] Y. Vita, "Penanaman Budaya Damai Via Pendidikan," *Dimas*, vol. 14, no. 1, pp. 17–28, 2014, [Online]. Available: <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/389>.
- [24] M. N. Ali, M. Mahfudz, R. Ramlan, and N. Rahman, "Sociopsychological rehabilitation model and the improvement of affected household food security in the terrorist's territory of Mt. Biru, Poso, Central Sulawesi," *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–12, 2018.
- [25] C. Buchanan, Ed., *Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue. Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue, 2011.
- [26] Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural," *Wawasan J. Ilm. Agama dan Sos. Budaya*, vol. 1, no. 2, pp. 187–198, 2016, doi: 10.15575/jw.v1i2.588.
- [27] A. Wakano, "Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku," *al-Iltizam J. Pendidik. Agama Islam*, vol. 4, no. 2, p. 26, 2019, doi: 10.33477/alt.v4i2.1006.

- [28] M. R. Jackman, "General and Applied Tolerance: Does Education Increase Commitment to Racial Integration?," *Am. J. Pol. Sci.*, vol. 22, no. 2, p. 302, 1978, doi: 10.2307/2110618.
- [29] A. Saefulloh, "Membaca 'Paradigma' Pendidikan dalam Bingkai Multikulturalisme," *Insa. J. Pemikir. Altern. Kependidikan*, vol. 14, no. 3, pp. 547–559, 1970, doi: 10.24090/insania.v14i3.375.
- [30] A. Mahpudz, "Pendidikan Harmoni: Sintesis Pedagogis dari Pendidikan multikultural dan Pendidikan Damai," *Bakti News: Memahami KTI dengan Seksama*, vol. V Edisi 79, pp. 23–24.
- [31] T. J. Lan, "Teori dan Praktek dalam Studi Konflik di Indonesia," *Antropol. Indones.*, vol. 0, no. 1, pp. 28–40, 2014, doi: 10.7454/ai.v0i1.3576.
- [32] A. Muzakki, "Memperkenalkan Kembali Pendidikan Harmoni Berbasis Kearifan Lokal (Piil Pesenggiri) Pada Masyarakat Adat Lampung," *J. PENAMAS J. Penelit. Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, vol. 30, no. 3, pp. 261–280, 2017.
- [33] A. Nursyifa, "Transformasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0," *J. Pendidik. Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, p. 51, 2019, doi: 10.32493/jpkn.v6i1.y2019.p51-64.
- [34] M. Rizak, "Peran Pola Komunikasi Antarbudaya Dalam Mencegah Konflik Antar Kelompok Agama," *Islam. Commun. J.*, vol. 3, no. 1, p. 88, 2018, doi: 10.21580/icj.2018.3.1.2680.
- [35] A. Widodo, D. Indraswati, D. Sutisna, and A. P. Anar, "Pendidikan IPS Menjawab Tantangan Abad 21 : Sebuah Kritik Atas Praktik Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar dikuasai siswa dalam menghadapi abad 21 hanyalah kemampuan terhadap teknologi dan," vol. 2, no. 2, 2020.
- [36] M. Shohib, "Student Centered Learning Solusi Atau Masalah di Era Revolusi Industri 4," *J. Ilm. Huk. dan Keadilan*, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/download/124/92>.
- [37] H. Astri, "Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal," *J. Aspir.*, vol. 2, no. 2, pp. 151–162, 2011, [Online]. Available: <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/439>.
- [38] J. Permana and W. Sujana, "Aplikasi Pembelajaran IPS Berbasis Pendekatan Konstektual," *J. Penelit. dan Pengemb. Pendidik.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–9, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJL/index>.
- [39] E. S. I. Putra, "Pendidikan Ips Di Era Globalisasi : Sebuah Pendekatan Kurikulum Pembelajaran.," *J. Pendidik. "EDUKASI"*, vol. 9, no. 1, p. 6, 2021.